Indigenous Knowledge

Volume 5 Number 1 (2026): June
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Multikultural Dalam Era Globalisasi

Axello Samuel Sitepu [1], Fadhly Mustofa Az-Zuhri [2], Muhammad Rizki Habibie[3]

[1]*Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret*
Corresponding author's email: axello203@student.uns.ac.id, fadhlymustofa@student.uns.ac.id , muhammad290105@student.uns.ac.id

Abstrak: Jurnal ini membahas peran kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural dan bagaimana implementasi kebijakannya terpengaruh oleh era globalisasi. Penelitian ini menguraikan berbagai aspek kewarganegaraan, seperti hak, kewajiban, dan identitas dalam konteks masyarakat yang beragam budaya. Penulis mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola kewarganegaraan dalam lingkungan globalisasi yang berkembang pesat, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat integrasi sosial dan budaya dalam komunitas multikultural. Studiini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya adaptasi kebijakan kewarganegaraandalam menghadapi dinamika global saat ini.

Kata kunci: Globalisasi; Kebijakan; Kewarganegaraan; Multikultural

1. Pendahuluan

Kewarganegaraan tidak sekadar identitas, melainkan juga meliputi aspek hak, kewajiban, partisipasi dalam urusan publik, dan penghargaan terhadap nilai-nilai masyarakat (JJ Cogan & Dericcot, 1998: 2-3).Konsep ini mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai anggota dari suatu negara ataupemerintahan tertentu. Namun, definisi kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada aspek hukumdan administratif. Ini juga memiliki implikasi yang mendalamdalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, migrasi massal, dan perubahan dinamika sosial, pemahaman tentang kewarganegaraan telah menjadi semakin kompleks. Tantangan inimencakup pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi warga negara, bagaimana cara mempertahankan status kewarganegaraan, dan bagaimana hak dan kewajiban kewarganegaraandiimplementasikan dalam masyarakat yang beragam.

Selain itu, konsep kewarganegaraan juga relevan dalam konteks perubahan politik dan sosial yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Isu-isu seperti hak-hak imigran, pluralismebudaya, pengungsi, dan konflik etnis semakin menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang definisi kewarganegaraan dan cara implementasinya dalam masyarakat yang heterogen.

Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki definisi kewarganegaraan yang beragam di berbagai negara serta menganalisis cara implementasinya dalam masyarakat yang multikultural. Dalam prosesnya, makalah ini akan mengulas berbagai teori dan pandangan

yang telah ada dalamliteratur, serta menggambarkan studi kasus dari negara-negara yang menghadapi tantangan kewarganegaraan yang kompleks.Dengan memahami definisi kewarganegaraan dan implementasinya secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang terkait dengan hak-hak individu, integrasi sosial, dan stabilitas politik dalam masyarakat modern.Oleh karena itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan yang semakin relevan dan penting diera kontemporer.

Masyarakat di era disrupsi mengalami pergeseran fundamental dalam cara mereka menjalanikehidupan sehari-hari, di mana aktivitas yang dahulu hanya terjadi di dunia nyata, kini semakin sering beralih ke dunia maya. Fenomena ini mencerminkan transformasi masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Kesimpulan dari pergeseran ini mencakup beberapa poin penting yang memahami fenomena ini dengan lebih mendalam,hal tersebut mencakup:

- Konektivitas Global: Dunia maya memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang di seluruh dunia tanpa harus bersua secara fisik. Ini memungkinkan kolaborasi global yang lebih erat dan pertukaran budaya yang lebih luas. Perubahan ini juga memberi peluang bagi keragaman budaya untuk bersinar.
- Revolusi Teknologi Digital: Era disrupsi ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi digital. Kemajuan internet, perangkat mobile yang canggih, serta aplikasi dan platform daring telahmengubah fundamental cara masyarakat berinteraksi dengan dunia. Akses yang mudah ke internettelah menjadi tulang punggung transformasi ini.
- Tantangan Keamanan dan Privasi: Terlepas dari manfaat besar, pergeseran ke dunia maya juga membawa tantangan baru terkait dengan keamanan data dan privasi individu. Melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi telah menjadi isu yang semakin penting, mengingat volume besar data yang dikumpulkan dan dibagikan secara daring.
- Dampak Sosial dan Budaya: Perubahan ini juga memengaruhi dinamika sosial dan budaya. Aktivitas hiburan, pendidikan, komunikasi, dan pola tidur telah berubah karena pergeseran ini. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan budaya masyarakat.
- Pendidikan Digital: Agar dapat berpartisipasi secara efektif di dunia maya, pendidikan digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan digital agar bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan produktif. Literasi digital dan keamanan siber adalah elemen penting dari pendidikan ini.
- Perubahan Terus Berlanjut: Pergeseran aktivitas ke dunia maya adalah fenomena yang terus berkembang dan terus berubah. Inovasi teknologi seperti augmented reality, virtual reality, kecerdasan buatan, dan Internet of Things akan terus membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia maya. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan iniakan menjadi kunci dalam menjalani kehidupan di masa depan.

Dalam kesimpulannya, pergeseran aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya dalam era disrupsi menciptakan transformasi mendalam dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, berbelanja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Ini adalah hasil dari perkembangan teknologi digital yang pesat dan akan terus memengaruhi cara kita menjalani kehidupan di masa depan. Penting bagi masyarakat untuk memahami, merespons, dan beradaptasi dengan perubahan ini, sambil tetap menjaga aspek penting seperti keamanan data, privasi, dan keseimbangan dalam kehidupan digital mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang

perubahan ini, masyarakat dapat mengambil manfaat dari peluang yang muncul sambil mengatasi tantangan yang ada dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.

2. Pembahasan

Pengelolaan Kewarganegaraan Dalam masyarakat Multikultural mengelola kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural adalah tugas yang kompleks dan penting untuk memastikan harmoni, inklusi, dan perkembangan yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang cara mengelola kewarganegaraan dalam konteks masyarakat multikultural:

- Pendidikan Multikultural: Mendukung sistem pendidikan yang mendorong pemahaman mengenaiberagam budaya, agama, dan latar belakang etnis. Memasukkan kurikulum yang mencakup sejarah, nilai-nilai, dan kontribusiberbagai kelompok budaya dalam pembelajaran.
- Kebijakan Anti Diskriminasi: Menerapkan hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, atauetnis.Memastikan perlindungan hukum bagi warga negaradari berbagai latarbelakang.
- Integrasi Sosial: Mendorong integrasi sosial dengan mengadakan program-program yang memfasilitasi pertemuan antar kelompok etnis dan budaya. Memberikan dukungan untuk pembelajaran bahasa negara kepada imigranbaru.
- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara. Menghindari campur tangan berlebihan dalam urusan agama.
- Kebijakan Inklusi: Membuat kebijakan yang mempromosikan inklusi dalam pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Memfasilitasi akses yang setara untuk semua warga negara.
- Komunikasi dan Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran untuk memerangi stereotip dan prasangka. Memotivasi dialog antar kelompok budaya untuk memahami satu sama lain.
- Kebebasan Media: Memastikan kebebasan media yang sehat dan beragam, yang mempromosikanberita yang adil dan akurat tentang semua kelompok masyarakat.
- Kepemimpinan Multikultural: Mendorong keberagaman dalam posisi kepemimpinan dan pemerintahan. Memastikan bahwa representasi dalam lembaga-lembaga publikmencerminkan keragaman masyarakat.
- Kerja Sama Internasional: Berpartisipasi dalam kerja sama internasional yang mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan toleransi antar negara-negara multikultural.
- Penegakan Hukum: Menegakkan hukum dengan tegas terhadap tindakan kebencian rasial, ekstremisme, atau tindakan diskriminatif lainnya.

Mengelola kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah,maupun individu. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan damaidi mana setiap warga negara merasa dihormati dan memiliki kesempatan yang sama.

Di Indonesia, regulasi terkait pengelolaan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.
Berikut adalah beberapa poin utama terkait regulasi ini:

- Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 26B menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib memelihara kesatuan bangsa, menjaga persatuan, serta mewujudkan kerukunan nasional.UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan: Undang-undang ini mengaturberbagai aspek kewarganegaraan, termasuk perolehan, pemberian, danpencabutan kewarganegaraan. Hal ini mencakup ketentuan tentang pernikahan antarbangsa dan pemeliharaan hak-hak kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan.
- UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: Notaris berperan pentingdalam memastikanproses administrasi terkait kewarganegaraan, seperti pembuatan akta kelahirandan pernikahan. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Undang- undang inimengatur prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil dan merata tanpa diskriminasi, termasuk dalam kontekskewarganegaraan.
- Peraturan Pemerintah tentang Pemberian dan Pembatalan Kewarganegaraan: Peraturan inimengatur prosedur untuk memberikan dan mencabut kewarganegaraan, serta syarat-syaratyang harus dipenuhi oleh individu yangingin menjadi warga negara Indonesia.
- Kebijakan Multikulturalisme: Pemerintah Indonesia mendorong multikulturalisme sebagailandasan untuk mengelola keragaman etnis, agama, dan budaya dalam masyarakat. Prinsipini tercermin dalam berbagai program pendidikan dan sosial.
- Lembaga-Lembaga Terkait: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya bertanggung jawab atas implementasi regulasi terkait kewarganegaraan dan kerukunan nasional.

Dalam praktiknya, Indonesia berupaya menjaga kerukunan antar-etnis, agama, dan budaya melalui pendekatan multikulturalisme yang menciptakan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpadiskriminasi berdasarkan latar belakang budaya atau agama mereka.

Implementasi kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Era Globalisasi Implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dalam era globalisasi didasarkan pada beberapa dasar hukum yang penting. Berikut adalah penjabarannya:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Landasan utama kewarganegaraan di Indonesia terdapat dalam UUD 1945. Pasal 26 dan 27 UUD 1945 mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. UUD 1945 juga mengakui prinsip jus soli, yang berarti bahwa setiap individu yang lahir di wilayah Indonesia dianggap sebagai warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kewarganegaraan, termasuk prosedur pemberian, pembatalan, atau penghapusan kewarganegaraan. Selain itu, UU ini juga mengatur kewarganegaraan ganda, yang memungkinkan warga negara Indonesia untuk memiliki kewarganegaraan ganda dengan persetujuan tertentu.

Peraturan Pemerintah: Selain UU tentang kewarganegaraan, ada berbagai peraturan pemerintah yang lebih detail dalam mengatur berbagai aspek kewarganegaraan, termasuk tata cara pemberian kewarganegaraan kepada orang asing, prosedur pencabutan

kewarganegaraan, danlain-lain.

Dalam era globalisasi, implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Perpindahan Penduduk: Globalisasi memfasilitasi perpindahan penduduk antarnegara dengan lebih mudah. Hal ini menimbulkan isu-isu terkait dengan status kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan ganda dan hak-hak warga negara.
- Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri: Dalam era globalisasi, warga negaraIndonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri memerlukan perlindungan dan hak-hak kewarganegaraan yang harus dijaga oleh negara.
- Keamanan Nasional: Pengaturan kewarganegaraan juga berkaitan dengan keamanan nasional, terutama dalam hal mencegah pergerakan orang asing yangberpotensi membahayakan negara.

Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan tetap relevandan responsif terhadap dinamika globalisasi, sambil mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum yangada. Ini mencakup perlindungan hak-hak warga negara,pengaturan perpindahan penduduk, dan menjaga keamanan nasional. Selain itu, kerjasama internasional juga penting dalam mengatasi isu-isu terkait kewarganegaraan dalam era globalisasi.

Masyarakat di era disrupsi menggeser aktivitas yang semula dilakukan di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Perubahan dalam era disrupsi terjadi dalam berbagai sektor. Di Indonesia disrupsi pada bisnis dapat dilihat dengan hadirnya marketplace alternatif yang memudahkan transaksi antara produsen dan konsumen, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Disrupsi pada bidang informasi dapat dilihat dengan hadirnya local guides dan youtube.

Disrupsi pada bidang sosial budaya dapat dilihat dengan maraknya pembangunan pariwisatadi berbagai daerah (Purwowibowo & Wahyudi, 2017).

Disrupsi juga berpengaruh dalam dunia pendidikan. Di tahun 2020 dapat dikatakan kita sudah mengalami disrupsi pada segala sektor, yangsalah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19. Disrupsi di sektor pendidikan dapat dilihat dengan adanya perubahan drastis pada aktivitas dan proses pembelajaran. Kondisi ini memaksa penggunaan teknologi dan internet untuk proses pembelajaran.

Disrupsi dapat membuka peluang untuk menciptakan kemajuan, namun apabila peluang tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berbalik menjadi kerugian. Berikut adalah cara menghadapi disrupsi agar tidak tertinggal dan berdampak negatif, yaitu:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pemanfaatan adanya disrupsi. Sumber daya yang berkualitas dapat mudah beradaptasidan siap dengan perubahan. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi mampu mengejar ketertinggalan dan mempunyai daya saing.
- Terus Berinovasi Zaman selalu berkembang, sehingga inovasi adalah kunci untuk mampu bertahan dalam disrupsi. Melihat kilas balik perkembangan dari ponsel menuju smartphone,keterlambatan Nokia dalam membuat inovasi android membuatnya tidak dapat bertahan dengan baik. CEO Nokia, Stephen Elop pada saat menyerahkan perusahannya pada Microsoft mengatakan “we don’t do anything wrong but then we lost”. Keterlambatan inovasi Nokia menjadi contoh betapa pentingnya untuk terus berinovasi.
- Melek Teknologi Dengan adanya teknologi segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Contoh manfaat teknologi yaitu adanya m-banking, ecommerce, dan lain

sebagainya. Kemampuan untuk mengoperasikan teknologi sangat dibutuhkan di era disrupsiyang segala sesuatunya menggunakan teknologi.

Di era disrupsi kita dihadapkan pada dua pilihan, menciptakan yang baru (create) dengan berani berinovasi sesuai dengan kebutuhan atau membentuk ulang (reshape) dengan melakukan inovasi pada apa yang sudah dimiliki. Pendidikan sebagai unsur penting dalam suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu negara. Tingkat kebutuhan pendidikan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Di era disrupsi globalisasi pendidikanmengalami perubahan dengan munculnya proses pembelajaran online melalui kelas virtual. Proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Putranti 2016).

Kondisi di masa pandemi juga berdampak pada pendidikan dan memaksa penutupan sementara lembaga pendidikan demi menekan penyebaran covid-19, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring. Sejalan dengan adanya disrupsi globalisai, kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi atas (Samsuri 2011):

- Inisiasi internal (internal initiation) Upaya perubahan kebijakan pendidikan yang datang dari kalangan profesi pendidikan sebagai internal pendidikan itu sendiri.
- Transaksi eksternal (external transaction) Transaksi eksternal dilakukan dengan cara negosiasi antara internal pendidik dan kelompok kepentingan eksternal.
- Manipulasi politik (political manipulation) Manipulasi politik merupakan pengaruh dari pemerintah untuk memberi dukungan atau penolakan terhadap alokasi nilai yang diperjuangkan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan dalam pendidikan kewarganegaraan perlu diperhatikan lebih seiring dengan adanya disrupsi globalisasi yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan pembaharuan berupa perubahan dan perbaikan secara komprehensif untuk kemajuan dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Great ought pendidikan kewarganegaraan setiap negara adalah dasar dari sistem politik negara tersebut. Dasar yang dijadikan pedoman oleh negara Indonesia adalah pancasila, sehinggapendidikan kewarganegaraan yang merupakan upaya untuk pembentukan warga negara juga harus berdasar pada pancasila sebagai dasar negaranya. Pendidikan kewarganegaraan berperan strategisdalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting untuk pertumbuhan budaya masyarakat (civic culture). Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik yang dilakukansebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat..Oleh sebab itu diajarkan dari tingkat sekolah dasarhingga perguruan tinggi.

Persoalan kehidupan warga negara yang telah mengalami globalisasi (globalized) membukaminat baru dunia terhadap pendidikan kewarganegaraan (Patrick 2002). Kajian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat global telah memiliki arti penting. Pendidikan kewarganegaraan dimasa depan nantinya akan terkait dengan masalah-masalah perjuangan yang bertujuan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan (recognition), kewarganegaraan versus hak asasi manusia (citizenship versus human rights), dan kewarganegaraan global versus kewarganegaraan kosmopolitan (global citizenship versus cosmopolitan citizenship).

Disrupsi globalisasi menyebabkan adanya tuntutan pergeseran paradigma pada pendidikan kewarganegaraan, yang disebabkan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap diri maupun lingkungannya. Disrupsi globalisasi membawa perubahan paradigmatik pada kajian dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Salah satunya berubahnya standarisasi kompetensi lulusan dan tenaga pengajar yang semakin

memantapkan kedudukan kendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pengembangan kepribadian. Namun di sisi lain disrupsi globalisasi menjadi tantangan bagi para pengembang pendidikan kewarganegaraan agar berusahalebih keras untuk melakukan pengembangan substansi kajian bahan ajar.

Kebijakan pendidikan kewarganegaraan telah dilaksanakan di lembaga formal, seperti di sekolah dan institusi pendidikan tinggi, namun permasalahan krisis moral khususnya di Indonesia tidak akan pernah berhenti berkembang. Sehingga hal tersebut yang melatar belakangi betapa pentingnya kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang baik dan mampu bertahan di era disrupsi globalisasi.Permasalahan utama pendidikan di Indonesia menurut (Azra 2001) berakar dari adanya krisis moral, yaitu:

- Hilangnya objektivitas orientasi pendidikan telah kehilangan objektivitasnya;
- Kematangan diri yang terjadi secara tidak tepat di lingkungan sekolah;
- Terbatasnya proses pendidikan di sekolah, seperti terbatasnya ruang untuk kreativitas baikbagi siswa ataupun guru;
- Beban kurikulum yang terlalu memberatkan dan lebih cenderung berorientasi pada pengembangan domain kognitif;
- Belum diprioritaskannya materi pembelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan moral,atau pendidikan kewarganegaraan;
- Siswa dihadapkan dengan nilainilai yang bertentangan; dan
- Minimnya teladan moral yang hidup dalam kehidupan sehari-hari para siswa.

Kebijakan pendidikan kewarganegaraan penting bagi setiap negara sebagai upaya pembangunan karakter nasional untuk mempertahankan eksistensi dihadapan negara lain. The founding father Indonesia, Ir. Soekarno berhasil membudayakan benih karakter nasional yang terbukti dengan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan (Pratama 2020). Suatu bangsa dapat dikatakan sebagai bangsa yang maju dan kuat apabila nilai-nilai dasar yang menjadi pedomannya dapat tercermin dalam perilaku masyarakatnya sehari-hari.Sehingga tidak akan ada lagi perilaku penyimpang, penjajahan, diskriminasi, maupun perilaku negatif lainnya. Kebijakan menanamkan pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan formalsudah sewajarnya melahirkan warga yang mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam menghadapi era disrupsi globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai pancasila

3. Kesimpulan

Multikulturalisme sebagai Kenyataan Global. Makalah ini menguraikan bagaimana globalisasi telah membawa berbagai budaya dan kelompok etnis bersatu dalam satu masyarakat. Ini menunjukkan perlunya memiliki pemahaman mendalam tentang kewarganegaraan yang inklusif. Tantangan Integrasi menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan berbagai kelompok ini ke dalam masyarakat yang lebih besar. Ini termasuk masalah seperti ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan konflik budaya. Makalah ini membahas pentingnya kebijakan publik dalam mengelola keragaman dan mempromosikan kewarganegaraan yang kuat dalam masyarakat multikultural. Ini melibatkan pembuatan hukum dan aturan yang mendukung inklusi, kesetaraan, dan keadilan.Pendidikan dan Kesadaran: Penulis juga menyoroti peran pendidikan dalam

menciptakan kesadaran tentang pentingnya menghargai perbedaan dan memahami nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks multikultural.

Secara keseluruhan, makalah ini menggarisbawahi pentingnya menghadapi kompleksitas masyarakat multikultural dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang inklusif. Ini adalah pandangan yang relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasiyang terus berlanjut.

Masyarakat di era disrupsi mengalami pergeseran fundamental dalam cara mereka menjalanikehidupan sehari-hari, di mana aktivitas yang dahulu hanya terjadi di dunia nyata, kini semakin sering beralih ke dunia maya. Fenomena ini mencerminkan transformasi masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Kesimpulan dari pergeseran inimencakup beberapa poin penting yang memahami fenomena ini dengan lebih mendalam.

- Revolusi Teknologi Digital: Era disrupsi ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi digital. Kemajuan internet, perangkat mobile yang canggih, serta aplikasi dan platform daring telah mengubah fundamental cara masyarakat berinteraksi dengan dunia. Akses yang mudah ke internet telah menjadi tulang punggung transformasi ini.
- Transformasi Ekonomi: Perubahan paradigma ini telah menciptakan ekonomi digital yang tumbuh pesat. Bisnis e-commerce, aplikasi berbasis platform, dan layanan daring telah menjadi kekuatan ekonomi utama. Perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan model bisnis online telah menciptakan peluang baru, sementara bisnis konvensional menghadapi tantangan dalam beradaptasi.
- Konektivitas Global: Dunia maya memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang di seluruh dunia tanpa harus bersua secara fisik. Ini memungkinkan kolaborasi global yang lebih erat dan pertukaran budaya yang lebih luas. Perubahan ini juga memberi peluang bagi keragaman budaya untuk bersinar.
- Tantangan Keamanan dan Privasi: Terlepas dari manfaat besar, pergeseran ke dunia maya juga membawa tantangan baru terkait dengan keamanan data dan privasi individu. Melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi telah menjadi isu yang semakin penting, mengingat volume besar data yang dikumpulkan dan dibagikan secara daring.
- Dampak Sosial dan Budaya: Perubahan ini juga memengaruhi dinamika sosial dan budaya. Aktivitas hiburan, pendidikan, komunikasi, dan pola tidur telah berubah karena pergeseran ini. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan budaya masyarakat.
- Pendidikan Digital: Agar dapat berpartisipasi secara efektif di dunia maya, pendidikan digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan digital agar bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan produktif. Literasi digital dan keamanan siber adalah elemen penting dari pendidikan ini.
- Perubahan Terus Berlanjut: Pergeseran aktivitas ke dunia maya adalah fenomena yang terus berkembang dan terus berubah. Inovasi teknologi seperti augmented reality, virtual reality, kecerdasan buatan, dan Internet of Things akan terus membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia maya. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan iniakan menjadi kunci dalam menjalani kehidupan di masa depan.

Dalam kesimpulannya, pergeseran aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya dalam era disrupsi menciptakan transformasi mendalam dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, berbelanja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Ini adalah hasil dari perkembangan

teknologi digital yang pesat dan akan terus memengaruhi cara kita menjalani kehidupan di masa depan. Penting bagi masyarakat untuk memahami, merespons, dan beradaptasi dengan perubahan ini, sambil tetap menjaga aspek penting seperti keamanan data, privasi, dan keseimbangan dalam kehidupan digital mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang perubahan ini, masyarakat dapat mengambil manfaat dari peluang yang muncul sambil mengatasi tantangan yang ada dalam duniayang semakin terhubung secara digital. Saran yang dapat diberikan adalah untuk terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, menghormati keragaman, dan mendukung pendidikan yang memupuk pemahaman multikultural. Diperlukan juga upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang dampak globalisasi terhadap masyarakat multikultural dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk membentuk kebijakan yang efektif.

Referensi

Jurnal:

Azyumardi Azra (2001) Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia

Putranti, N. 2016. Cara membuat media pembelajaran online menggunakan edmodo. Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains, 2(2), 139-147.

Purwowibowo, P., Hariyono, S., & Wahyudi, D. (2017) Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based on Environmental). Share: Social Work Journal. Vol. 7(1), hlm 39-45.

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Karakter Nasional di Indonesia penulis : D.Fadly Pratama, M.Pd. (pratama 2020)

Buku:

Buku: Patrick, J. J. 2002. Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy. Washington: Institute of Education Science.

Heater, Derek. 2004. A Brief History of Citizenship. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Samsuri. (2011). Pendidikan Karakter Warga Negara, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. (samsuri 2011)